



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lumajang, Januari 2019

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KABUPATEN LUMAJANG

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100 %
		2) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84 %
		3) Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %
		4) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
2	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	5) Indeks Pembangunan Literasi	0,70 %
3	Terpeliharanya Budaya Daerah	6) Persentase Budaya Daerah yang dilestarikan	97,91 %
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan	7) Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan	64 %
		8) Nilai Pendidikan Keagamaan	80
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	9) Angka Harapan Hidup	69,64
6	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	10) <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,84 %
7	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	11) Persentase Indeks Pembangunan Gender	89,15 %
8	Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	12) Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) Berprestasi	16 Cabor
9	Meningkatnya Usaha Perdagangan	13) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	47,339 %
10	Meningkatnya Sektor Industri	14) Persentase PDRB Sektor Perindustrian	39,820 %
11	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	15) Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	93,04 %
		16) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	2,54 %

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
12	Meningkatnya Investasi di Daerah	17) Persentase Kenaikan Nilai PMDN	6,83 %
13	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	18) Indeks angka kecelakaan lalu lintas	33,58 %
14	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	19) Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	2,22 %
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam PDRB	20) PDRB Sektor Pertanian	7,139.40 milyar
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan Dalam PDRB	21) PDRB Sektor Perikanan	486,7 Milyar
17	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,56
18	Meningkatnya Wisatawan	23) Persentase peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan	13,5 %
19	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	24) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	8,1520 %
20	Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang	25) Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan	2 Dokumen
21	Meningkatnya Ketahanan Pangan	26) Persentase peningkatan pola pangan harapan (PPH)	93,5
22	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa	27) Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) Berdasarkan Indeks Desa Membangun	5 Desa
23	Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman	28) Persentase Rumah Tangga (RT) yang Terlayani Infrastruktur Dasar	62,28 %

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
24	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	29) Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	26,75 %
25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	30) Persentase Penduduk yang terlayani Adminduk	95 %
26	Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi	31) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik	301 Media
27	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	32) Persentase OPD dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	73,4 %
		33) Nilai Maturitas SPIP	3
		34) Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		35) Nilai SAKIP Kabupaten	B
		36) Persentase Kompetensi ASN	90 %
		37) Persentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	100 %
		38) Hasil Audit Kearsipan Pemerintah Kabupaten	75
		39) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
28	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40) Opini BPK	WTP
29	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	41) Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	90,55 %
30	Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana	42) Indeks Risiko Bencana	161,70 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	15.373.347.650
2.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1.194.002.000
3.	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	1.126.400.000
4.	Fasilitasi kegiatan keagamaan	2.564.124.200
5.	Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	1.143.840.500
6.	Fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan	308.528.500
7.	Kesehatan masyarakat	25.418.202.618
8.	Pelayanan kesehatan	43.487.102.950
9.	Peningkatan manajemen kesehatan	16.819.485.500
10.	Sumber daya kesehatan	15.159.398.039
11.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	2.408.629.900
12.	Pembinaan lingkungan	1.000.000.000
13.	Keluarga berencana	361.200.000
14.	Pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan	5.511.348.000
15.	Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	552.810.000
16.	Perlindungan perempuan dan anak	334.880.000
17.	Perencanaan sosial dan budaya	902.500.000
18.	Pembinaan kepemudaan	1.148.497.500
19.	Pembinaan keolahragaan	4.530.974.500
20.	Peningkatan dan pengembangan ekspor	25.725.000
21.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	301.100.000
22.	Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah	9.693.232.200
23.	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	55.000.000
24.	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum	200.000.000
25.	Pembinaan lingkungan sosial	632.000.000
26.	Pengembangan industri kecil dan menengah	100.000.000
27.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	750.905.000
28.	Pengembangan dan peningkatan pendukung usaha koperasi	477.048.000
29.	Penciptaan, peningkatan, pengembangan usaha mikro	432.122.250
30.	Pembinaan lingkungan sosial	200.000.000
31.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	389.087.600
32.	Optimalisasi pelayanan perijinan	394.390.000
33.	Peningkatan pelayanan angkutan	1.469.252.000
34.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.395.467.000
35.	Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	26.095.580.500
36.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	58.800.000
37.	Pengembangan wilayah transmigrasi	170.000.000
38.	Peningkatan kesempatan kerja	50.000.000
39.	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	109.198.000
40.	Pengembangan ketenagakerjaan	20.275.000
41.	Pembinaan lingkungan sosial	1.165.000.000
42.	Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	1.900.645.000
43.	Peningkatan prasarana dan sarana pertanian	7.107.453.500

No.	Program	Anggaran (Rp)
44.	Peningkatan SDM dan informasi pertanian	986.918.000
45.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan	925.900.000
46.	Peningkatan produksi, produktivitas dan dan mutu hasil tanaman perkebunan	897.053.300
47.	Peningkatan produksi dan nilai tambah peternakan dan kesehatan hewan	3.237.070.900
48.	Pembinaan lingkungan sosial	150.000.000
49.	Peningkatan kualitas bahan baku	1.850.000.000
50.	Pengembangan budidaya perikanan	1.301.049.000
51.	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	269.497.000
52.	Pengembangan perikanan tangkap dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan perairan umum daerah dalam pengawasan serta pengendalian sumber daya perikanan	1.133.691.000
53.	Pembinaan lingkungan sosial	100.000.000
54.	Pengelolaan persampahan	5.705.336.050
55.	Pengendalian lingkungan hidup	1.232.412.000
56.	Pemeliharaan lingkungan hidup	1.979.836.500
57.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.030.322.800
58.	Pembinaan lingkungan sosial	300.000.000
59.	Pengembangan pemasaran pariwisata, kebudayaan dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan	893.154.000
60.	Pengembangan destinasi pariwisata	7.156.832.000
61.	Peningkatan pengembangan ekonomi kreatif	964.438.000
62.	Penyelenggaraan tata ruang	1.013.724.400
63.	Pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan teknis	6.812.233.400
64.	Pengelolaan sumber daya air	24.895.310.700
65.	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman	13.077.859.100
66.	Penyelenggaraan jalan dan jembatan	126.198.257.080
67.	Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	428.586.600
68.	Peningkatan diversifikasi dan konsumsi pangan (pertanian/perkebunan)	326.778.400
69.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	542.005.000
70.	Pembinaan lingkungan sosial	100.000.000
71.	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat	1.765.500.000
72.	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	1.515.084.000
73.	Pengembangan perumahan	2.420.422.000
74.	Lingkungan sehat permukiman	1.532.587.500
75.	Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	1.035.000.000
76.	Pelayanan rehabilitasi sosial	1.250.000.000
77.	Penanganan dan pemberdayaan sosial	1.465.000.000
78.	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	343.895.000
79.	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	941.560.000
80.	Pengelolaan dan pengembangan SIAK	242.400.000
81.	Peningkatan pemanfaatan data dan inovasi	209.500.000
82.	Pengelolaan informasi dan media massa	1.620.518.500
83.	Optimalisasi pengelolaan komunikasi publik	729.031.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
84.	Optimalisasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.041.153.800
85.	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	184.840.000
86.	Pengamanan informasi pemerintah daerah	84.825.000
87.	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	860.000.000
88.	Pengembangan kompetensi aparatur	7.962.291.400
89.	Mutasi dan promosi	353.895.000
90.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi	2.011.197.000
91.	Penilaian kinerja aparatur dan penghargaan	537.832.000
92.	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum	136.090.000
93.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	2.245.830.000
94.	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	200.000.000
95.	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	79.940.000
96.	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	165.785.000
97.	Peningkatan percepatan pemberantasan korupsi	406.515.000
98.	Pengembangan dan penyempurnaan produk hukum	605.000.000
99.	Pengelolaan kearsipan	295.285.000
100.	Reformasi birokrasi	754.223.100
101.	Peningkatan dan pengembangan penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah	2.310.703.000
102.	Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah daerah	803.741.650
103.	Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan sistem dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1.822.151.600
104.	Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	1.627.389.900
105.	Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	871.535.600
106.	Kajian masalah strategis	913.660.000
107.	Pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	376.981.000
108.	Hubungan antar lembaga	202.060.000
109.	Pencegahan, kesiapsiagaan dan logistik	1.458.020.000
110.	Kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi	2.249.290.000
	JUMLAH	448.676.551.187

Lumajang, 15 Januari 2019



BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML.